

Analisis Pengaduan Bulan Februari 2026



Diagram di atas menunjukkan perbandingan aduan yang telah selesai dan yang masih proses. Dari 20 aduan yang masuk, 17 Aduan terselesaikan dan 3 masih dalam proses

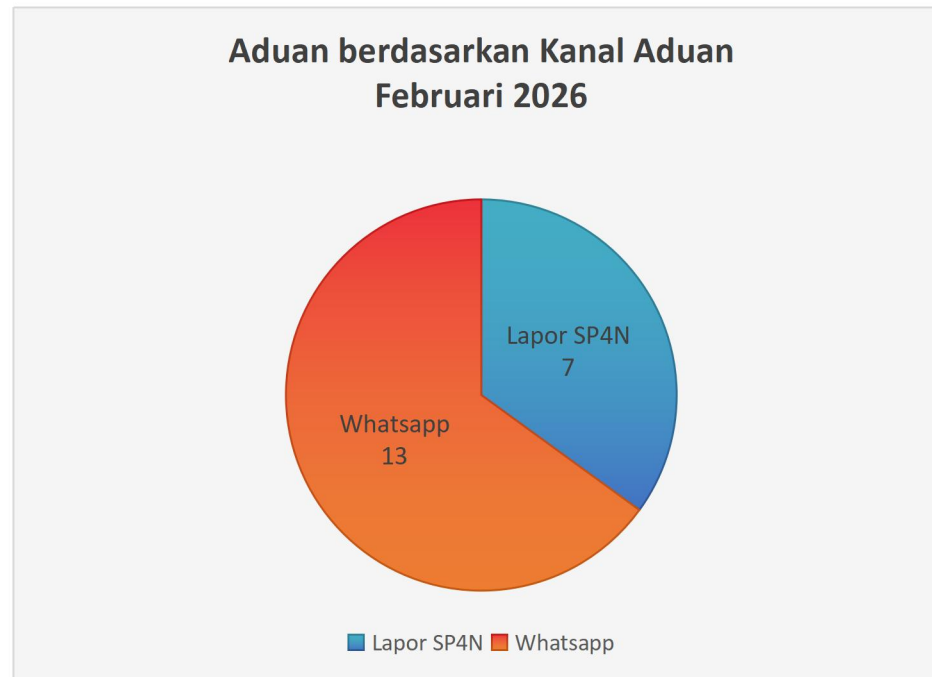


Diagram di atas menunjukkan Jumlah aduan berdasarkan kanal aduan. Dibulan Desember kanal aduan Whatsapp menjadi kanal terbanyak yang mendapatkan aduan sebanyak 13 aduan dan Kanal SP4N LAPOR mendapatkan 7 aduan.

Laporan Pengaduan per OPD bulan Februari 2016

No	opd	akronim	Jumlah aduan	Proses	Selesai
1	RSUD DR. SOEDOMO	RSUD	5	0	5
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dukcapil	3	0	3
3	KECAMATAN WATULIMO	Watulimo	2	0	2
4	KECAMATAN PULE	Pule	1	0	1
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BPBD	1	0	1
6	DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Dishub PKP	1	0	1
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinsos PPPA	1	0	1
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN KEBAKARAN	Satpol PPK	1	0	1
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dis LH	1	0	1
10	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinkes - PPKB	1	0	1
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kominfo	1	1	0
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1	1	0
13	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bakeuda	1	1	0
14	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Dispora	0	0	0
15	DINAS PETERNAKAN	disnakan	0	0	0
16	RSUD PANGGUL	RSUD Panggul	0	0	0
17	PDAM	PDAM	0	0	0
18	POSKO GERTAK	Posko Gertak	0	0	0
19	KECAMATAN PANGGUL	Panggul	0	0	0
20	KECAMATAN BENDUNGAN	Bendungan	0	0	0
21	KECAMATAN TUGU	Tugu	0	0	0
22	KECAMATAN DONGKO	Dongko	0	0	0
23	KECAMATAN SURUH	Suruh	0	0	0

24	KECAMATAN KARANGAN	Karangan	0	0	0
25	KECAMATAN GANDUSARI	Gandusari	0	0	0
26	KECAMATAN KAMPAK	Kampak	0	0	0
27	KECAMATAN MUNJUNGAN	Munjungan	0	0	0
28	KECAMATAN DURENAN	Durenan	0	0	0
29	KECAMATAN POGALAN	Pogalan	0	0	0
30	KECAMATAN TRENGGALEK	Trenggalek	0	0	0
31	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kesbangpol	0	0	0
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BKD	0	0	0
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappedalitbang	0	0	0
34	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Disparbud	0	0	0
35	DINAS PERIKANAN	Perikanan	0	0	0
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Disippus	0	0	0
37	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PMPTSP	0	0	0
38	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Komidag	0	0	0
39	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PMD	0	0	0
40	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pertapan	0	0	0
41	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Perinaker	0	0	0
42	DINAS PENDIDIKAN	Disdik	0	0	0
43	INSPEKTORAT	Inspektorat	0	0	0
44	SEKRETARIAT DPRD	Setwan	0	0	0
45	SEKRETARIAT DAERAH	Setda	0	0	0

Berdasarkan data laporan pengaduan pada bulan Februari 2026, terlihat adanya dinamika interaksi masyarakat yang cukup aktif terhadap berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, data mencerminkan tingkat respons yang sangat baik dari pemerintah daerah dalam menangani keluhan warga.

Ringkasan Statistik Utama

Total aduan yang masuk didominasi oleh segelintir instansi pelayanan publik primer. Tiga besar instansi dengan volume aduan tertinggi adalah:

1. RSUD DR. SOEDOMO: 5 Aduan
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil): 3 Aduan
3. Kecamatan Watulimo: 2 Aduan

Instansi lainnya seperti BPBD, Dinas Perhubungan (Dishub PKP), Satpol PP, hingga Dinas Kesehatan rata-rata menerima masing-masing 1 aduan.

Dari total aduan yang masuk, terlihat pola efisiensi yang kontras namun positif:

- Kecepatan Penyelesaian: Mayoritas OPD berhasil menyelesaikan 100% aduan yang masuk. Sebagai contoh, RSUD Dr. Soedomo dan Dukcapil sukses merampungkan seluruh laporan (total 8 aduan) tanpa ada tunggakan. Hal ini mengindikasikan bahwa prosedur operasional standar (SOP) penanganan keluhan pada instansi layanan dasar berjalan dengan efektif.
- Pekerjaan Rumah (Proses): Terdapat tiga instansi, yaitu Kominfo, PUPR, dan Bakeuda, yang masing-masing memiliki 1 aduan namun masih dalam status "Proses". Hal ini wajar mengingat sektor infrastruktur (PUPR) atau administrasi keuangan (Bakeuda) seringkali membutuhkan verifikasi lapangan atau birokrasi yang lebih kompleks dibandingkan layanan administratif cepat.
- Distribusi Aduan: Sangat menarik melihat bahwa dari 45 instansi yang terdaftar, sebagian besar (nomor 14 hingga 45) mencatatkan nol aduan. Ini bisa diinterpretasikan dalam dua cara: pelayanan sudah sangat prima sehingga minim keluhan, atau kanal pengaduan pada instansi-instansi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Kesimpulan

laporan Februari 2026 menunjukkan performa birokrasi yang responsif. Dengan tingkat penyelesaian yang tinggi pada sektor krusial seperti kesehatan dan kependudukan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengaduan ini diharapkan tetap terjaga. Tantangan berikutnya adalah mempercepat transisi status "Proses" menjadi "Selesai" pada sektor teknis agar tidak terjadi penumpukan di bulan berikutnya.